

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada saat ini pemasalahan mengenai laporan keuangan semakin marak untuk diperbincangkan, terutama dalam penyajian informasi. *Good public and corporate governance* dalam rangka mensejahterakan masyarakat semakin menguatnya tuntutan dari masyarakat untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparasi. Proses laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparasi diupayakan untuk meningkatkan pentingnya msayarakat dalam mengetahui kinerja yang dicapai oleh aparatur negara dalam menjalankan pemerintahan. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transaparasi pengelolaan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya untuk pengambilan keputusan dan sebagai informasi laporan keuangan (Harahap, 2011, hlm 205). Pemerintah daerah wajib memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan susmber daya manusia yang berkompeten. Informasi keuangan yang diperlukan dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yakni: 1) Relevan 2) Andal 3) Dapat dibandingkan 4) Dapat dipahami dalam pengelolaan dana pemerintah daerah dan laporan keungan pemerintah daerah harus bermanfaat bagi pemakai informasinya. Pemerintah harus memperhatikan informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sehingga laporan yang dihasilkan pemerintah daerah dapat terbebas dari opini Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan oleh BPK.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yaitu komptensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengeluarkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kompetensi SDM sangat berpengaruh dalam mencapai suatu keberhasilan dalam organisasi dan merupakan kunci keberhasilan suatu instansi karena SDM memiliki nilai tinggi oleh kemampuan, pengetahuan, dan ketampilan. Dengan kata lain, kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam menyajikan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat (Badriyah, 2015).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yaitu sistem pengendalian internal. Menurut (Krismiaji 2015, hlm. 216) menyatakan bahwa pengendalian internal (*internal control*) merupakan suatu rencana dan metode yang digunakan untuk melindungi asset, menghasilkan informasi yang akurat serta dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah ‘sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah’. Sistem pengendalian intern memiliki lima unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan SPI yang dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai dengan tercapainya efektifitas dan efisien pencapaian tujuan entitas. Lingkungan pengendalian diciptakan untuk memberikan perilaku yang positif dan kondusif dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem pengendalian intern di desain untuk mendeteksi apakah ada kelemahan di dalam lingkungan pengendalian. Menurut (Ardana & Lukman 2015, hlm. 75) sistem pengendalian internal yang didefinisikan oleh Committe of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadaway Commission adalah suatu proses yang diberlakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan aparat lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam katagori sebagai

berikut: (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan laporan keuangan, (c) ketataan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pelaporan keuangan dengan penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (SAKPD). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Halim, 2013, hlm.43). Untuk dapat menyajikan informasi laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan harus memiliki pemahaman tentang sistem akuntansi daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 angka 5 PP No.58/2005). Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dalam menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tabel 1. Permasalahan Terkait Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Tangerang Selatan	
Variabel	Permasalahan
Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Pemberian opini oleh BPK yaitu WTP
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kinerja pemerintahan kurang optimal
Sistem Pengendalian Internal	Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Masalah pengelolaan aset daerah

Sumber: Indonesia Berbicara.com

Pada tahun 2008 sampai tahun 2011, Kota Tangerang Selatan mendapatkan opini WTP dan pada tahun 2012 Kota Tangerang Selatan mendapatkan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf

Penjelas). Pada tahun 2013 dan tahun 2014 Kota Tangerang Selatan mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) selama dua tahun berturut-turut. Pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ini didapatkan karena laporan keuangan daerah yang baik, tetapi BPK menemukan adanya sejumlah temuan mengenai sumber daya manusia yang dimana kinerja pemerintah kota dan DPRD Tangerang Selatan yang mengecewakan. Sementara itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem pengendalian internal dimana terdapat adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang terjadi di daerah Tangerang Selatan. Selain itu terdapat kelemahan dalam administrasi, pengelolaan aset daerah, penatausahaan persedian yang belum tertib, pengelolaan pajak retribusi belum memadai dan verifikasi atas belanja yang belum optimal (Indonesia Berbicara.com). Sedangkan pada tahun 2012 Kota Tangerang Selatan mendapatkan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas), pemberian opini oleh BPK ini dengan pertimbangan permasalahan diantaranya masih terdapat pendataan aset tanah yang dianggap bernilai tidak wajar. Selain itu, mengenai inventarisasi aset yang belum lengkap dan belum didukung dengan bukti kepemilikan. Dan terdapat beberapa catatan pada Dinas Pendidikan yaitu tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban belanja makan dan minum sebesar Rp 312,14 juta dari bukti yang ditunjukkan sebesar Rp 300,82 juta diragukan keabsahannya. Selanjutnya Kota Tangerang Selatan belum menyajikan kewajibannya berupa tagihan penyedia jasa pembangunan sport center karena belum adanya kesepakatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Surastiani & Handayani (2015) menunjukkan hasil bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Namun berbeda hasil penelitian (Syarifudin, 2014) menunjukkan hasil bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Bangun (2015) bahwa sistem pengendalian internal merupakan faktor yang terbukti mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil peneliti Yendrawati

(2013) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Namun berbeda hasil penelitian Ihsanti (2014) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Karakteristik yang membedakan literatur sebelumnya Yendrawati (2013) dengan literatur sekarang adalah menambahkan variabel dari literatur sebelumnya adalah sistem akuntansi keuangan daerah, sampel yang digunakan oleh literatur sebelumnya adalah Dinas Sosial Daerah Istimewah Yogyakarta, sedangkan literatur sekarang menggunakan sampel SKPD Kota Tangerang Selatan. Tahun penelitian sebelumnya pada tahun 2013, namun literatur sekarang tahun penelitiannya pada tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh peneliti, maka peneliti melakukan penelitian untuk menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

I.2 Perumusan Masalah

- a. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan?
- b. Apakah Sistem pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan?
- c. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan
- b. Untuk membuktikan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
- c. Untuk membuktikan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan ilmu akuntansi pada sektor pemerintah yang menjadi refrensi atau masukan bagi kompetensi sumber daya manusia dalam memperbaiki sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan daerah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur tentang sektor publik yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan daerah.
- 2) Memberikan masukan bagi pemerintah daerah tentang pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para akademis tentang kualitas informasi laporan keuangan daerah.

